

Daftar Pustaka

- Abdul Halim, 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, UPP AMP YPKN, Yogyakarta.
- Abuddin Nata, 2005, *Integrasi Ilmu Agama Dan Ilmu Umum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Amran Muslimin, 2009, “*Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*” Dalam Ridwan , *Hukum Administrasi Di Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- Andrias Harefa, 2002, *Sekolah Saja Tidak Pernah Cukup: Menyoal Pendidikan Persekolahan Dan Pencarian Alternatif Pembelajaran*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Arif Nasution, 2000, *Demokrasi Dan Problema Otonomi Daerah*, Mundur Maju, Bandung.
- Benjamin Hoessein Dalam Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 1990, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi*, Berdasarkan UUD 1945, Pasca Sarjana Unpad, Bandung
- Heri Jauhar Muchtar, 2008, *Fikih Pendidikan*, Cetakan Kedua, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Isjoni, 2006, *Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kamus Pendidikan (Dictionary Of Education)
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.8, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ki Suratno, 2009, *Parikesit*, Cet. Pertama, Diva Press, Jogjakarta.
- Koentjaraningrat, 1977, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Jakarta.
- Leo Agustino, 2012, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan Kelimabelas, Gramedia, Jakarta.

- Munawir Sjadzali, 1991, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Dan Pemikiran*, Edisi 5, UI Pres, Jakarta.
- Murtir Jeddawi, 2005, *Memacu Investasi Di Era Otonomi Daerah Kajian Beberapa Perda Tentang Penanaman Modal*, UII Press, Yogyakarta.
- Nanang Fattah, 2013, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Cet. Kedua, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2009, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Cetakan Kelima, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nanang Gojali, 2004, *Manusia, Pendidikan, Dan Sains Dalam Perspektif Tafsir Hermeneutik*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Purwanto Setiadi Et.Al., 2013, *Agus Salim*, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta.
- RDH Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Mundur Maju, Bandung.
- Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta.
- Ronny Hanitiyo Soemitro, 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso S. Hamijoyo Dalam Hasbullah, 2010, *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Kusriyah, 2011, *Sistem Pemerintahan Dalam Perspektif Islam*, UNISSULA Press, Semarang.
- Suara Merdeka, *Pendidikan Belum Berkeadilan*, Edukasia, Kamis, 31 Oktober 2013.
- Suparlan Hartono, 2009, *Filsafat Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- Tri Rama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Karya Agung, Surabaya.
- Umar Tirtarahardja Dan La Sulo, 2000, *Pengantar Pendidikan*, Cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.

Yoyon Bahtiar Irianto, 2012, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan: Konsep, Teori, Dan Model*, Ed I, Cet. 2, Rajawali Pers, Jakarta.

Yusuf Al-Qardlawiy, Penerjemah Abad Badruzzaman, 2001, *Sunnah, Ilmu Pengetahuan Dan Peradaban*, Tiara Wacana, Yogya.

Zainuddin, 2006, *Filsafat Ilmu Perspektif Pemikiran Islam*, Cetakan Pertama, Prestasi Pustaka Jakarta.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 Tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan Pada Sekolah Dasar Dan Sekolah Menengah Pertama;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Kepada Peserta Didik Yang Orang Tua Atau Walinya Tidak Mampu Membiayai Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014;

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Sumber Wawancara

Wawancara Dengan Bapak Widianoro, Kepala Seksi Perencanaan Dinas Pendidikan, Pemuda, Dan Olahraga Kabupaten Jepara, 28 Januari 2014.

Wawancara Dengan Ibu Hastuti Harjanti, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, 26 Maret 2014